

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- : 13  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Rabu, 20 November 2019  
Waktu : 10.30 s.d. 17.55 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : 1. Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2019;  
2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran per Oktober TA. 2019;  
3. Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA. 2020;  
4. Isu-isu Aktual.  
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP)  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. 43 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Edhy Prabowo, M.M., M.B.A. (Menteri Kelautan dan Perikanan RI);  
2. Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc. (Sekretaris Jenderal);  
3. Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M. (Inspektur Jenderal);  
4. M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap);  
5. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya);  
6. Brahmantya Satyamurti Poerwadi, S.T. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut);  
7. Dr. Agus Suherman (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan/Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan);

8. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan);
9. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2019, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran per Oktober TA, 2019, Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA. 2020, dan Isu-isu Aktual, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2019 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2019 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp4.328.029.549.473,00 atau sebesar 78,61% per 18 November 2019. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan penyerapan anggaran berbasis perencanaan dan tepat sasaran.
3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6.448.661.749.000,00. Selanjutnya Komisi IV DPR RI bersama Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan pendalaman lebih detail terkait Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Program Bantuan Pemerintah (BP) Tahun Anggaran 2020 yang disesuaikan dengan kearifan lokal, serta mempublikasikan petunjuk teknis (juknis) di website Kementerian Kelautan dan Perikanan agar segala/semua persyaratan yang ada dapat dipersiapkan sejak dini oleh masyarakat.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat penyelesaian segala bentuk perijinan kapal yang masih terhambat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Kementerian yang terkait (seperti Perhubungan dan Ketenagakerjaan) dalam melindungi awak kapal/anak buah kapal yang diperlakukan secara tidak adil, baik sistem penggajian maupun sistem

fasilitasnya dengan pendampingan khusus agar kehadiran negara sejalan dengan hak asasi manusia.

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menyelesaikan pencemaran laut yang terjadi di perairan Indonesia akibat dari sampah limbah plastik, pertambangan, limbah B3, dan tumpahan minyak.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan evaluasi terhadap semua peraturan menteri (Permen KP) yang berpolemik di masyarakat agar iklim usaha kelautan perikanan tumbuh, maju, dan kondusif.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti kapal-kapal hasil IUU *fishing* yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang keputusannya dirampas untuk negara agar dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti lembaga pendidikan, koperasi, dan badan hukum yang memiliki kompetensi di bidang usaha penangkapan ikan.
10. Komisi IV DPR RI meminta Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait untuk melakukan pengembangan sentra kelautan perikanan atau program unggulan yang menjadi prioritas di setiap provinsi untuk mencapai kemandirian ekspor demi kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.55 WIB.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

Ttd.

**Edhy Prabowo, M.M., M.B.A.**

**Sudin, S.E.**  
**A-151**